

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MELALUI SITUS WEB DI DESA BULAKAN KABUPATEN PEMALANG

Novita Umi Nurhidayah¹, Budi Setiyono², Wijayanto³

Email: novitauminnn@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang *website* yang menjadi bagian dari inisiatif *e-government* di Desa Bulakan dalam menyediakan layanan kepada warganya. Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 mengenai sistem informasi desa. Situs Web Desa Bulakan juga dibangun guna penyampaian layanan publik, termasuk sebagai media promosi potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen sukses pengembangan *e-government* (*support, capacity, value*) pada situs web yang dilakukan oleh Desa Bulakan dan dinamika kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-government* melalui situs web tersebut. Penelitian ini menggunakan Elemen Sukses Pengembangan *E-Government* (*Support, Capacity, dan Value*) dari hasil kajian Harvard JFK School of Government. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan *in-depth interview*, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *e-government* melalui situs web di Desa Bulakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Berhasilnya pengembangan *e-government* dapat dibuktikan dari ketiga elemen sukses. *Support, political will* diwujudkan dengan Peraturan Desa Bulakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Desa Bulakan. *Capacity*, ketersediaan sumber daya finansial, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia ada sebagai kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*. *Value*, pemerintah desa dan masyarakat merasakan manfaat yang mempermudah kehidupan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Kendala yang dihadapi ialah ketika akan menyempurnakan dan melengkapi, terdapat perbedaan prioritas anggaran dan kekurangan tenaga IT untuk mempercepat dan memaksimalkan *website*. Rekomendasi dalam penelitian ini ialah diperlukannya distribusi sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki keahlian.

Kata Kunci: *E-Government, Situs Web, Support, Capacity, Value.*

ABSTRACT

This research discusses the website which is part of the e-Government initiative in Bulakan Village in providing services to its residents. As a form of implementation of Law Number 6 of 2014 Article 86 concerning village information systems, the Bulakan Village Website was also built to communicate public services, including as a medium for promoting village potential. This research aims to analyze the elements of successful e-Government development (support, capacity, value) in the implementation of e-Government development via a website carried out by Bulakan Village and the dynamics of obstacles faced in implementing e-Government via this website. This research uses the Elements of Successful E-Government Development (Support, Capacity and Value) from the results of the Harvard JFK School of Government study by Richardus Eko Indrajit (2006). Meanwhile, the research method used is a qualitative case study approach. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. The research results show that the development of e-Government through the website in Bulakan Village is in accordance with what was expected. The success of eGovernment development through a successful website in Bulakan Village can be proven from the third success element. Support and political will are realized in Bulakan Village Regulation Number 7 of 2019 concerning Management of the Bulakan Village Information System. Capacity, availability of financial resources, technological infrastructure, human resources are the keys to successful implementation of the e-Government concept. Value, the village government and community feel the benefits that make life easier, faster, more effective and efficient. The obstacle faced is that when it comes to perfecting and completing it, there are differences in budget priorities and a lack of IT energy to speed up and maximize the website. The recommendation in this research is the need to distribute human resources in accordance with competency and retain human resources who have expertise.

Keywords: E-Government, Website, Support, Capacity, Value

PENDAHULUAN

Modernitas hari ini kian berimplikasi dalam signifikansi peningkatan berbagai hal, baik teknologi, informasi, mobilisasi, investasi, maupun sumber daya, yang kemudian juga berdampak kepada tata cara pola berpikir masyarakat yang semakin kritis, utamanya terhadap inovasi program pemerintah dalam pelayanan publik guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perkembangan dunia yang berjalan begitu cepat membuat teknologi menarik batas antar informasi dan kebutuhan manusia.

Pemerintah dalam hal ini mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan permintaan kebutuhan masyarakat. Konsekuensi dari hidup yang serba cepat merupakan suatu keharusan dan perhatian bagi pemerintah bahwa perlu adanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan (Muksin & Avianto, 2021). Gaya dan pola kehidupan manusia telah jauh berbeda dari era-era sebelumnya. Bilamana sebelumnya manusia menghabiskan berbulan-bulan waktu untuk mengerjakan sesuatu seperti dokumen-dokumen tertentu, maka pada era digital saat ini, hanya dibutuhkan

waktu tidak sampai memakan hitungan jam dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sejalan dengan hal tersebut, pola hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan warganya juga mau tidak mau ikut berubah, yang mana ini juga menyangkut dengan perkembangan sosiologis masyarakat sebagai akibat dari adanya revolusi teknologi dan berbagai fenomena sosial yang sedang berlangsung.

Kemajuan teknologi membawa perubahan yang cukup berarti terhadap pengelolaan pada sektor pemerintahan seperti perkembangan sistem informasi dan pelayanan publik melalui jaringan internet yang kemudian disebut sebagai salah satu bentuk *e-government*.

Pengembangan *e-government* sebenarnya merupakan sebuah langkah strategis dalam pemberian akses terhadap informasi dan interaksi antar masyarakat luas, terkhusus Kabupaten Pematang dalam pemerintahannya yang kemudian diikuti oleh seluruh desa di Kabupaten Pematang, baik mengenai isu-isu yang berkembang tentang informasi, pelayanan publik, sosial, ekonomi, maupun pelaksanaan keberjalanan pembangunan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 86 ayat (1) s.d. ayat (6) mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyiratkan Pembangunan pedesaan berbasis internet menjadi penting di tengah perkembangan informasi dan teknologi komunikasi. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang merealisasikan beberapa langkah *epic*, seperti yang ditemukan Khusna (2019) bahwa: “(1) Pemerintah Kabupaten Pemalang telah membentuk PUSPINDES (Pusat Pemberdayaan Informatika Perdesaan), (2) membuat *website* desa, (3) Sidekem (Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang).

Desa yang pada dasarnya adalah pondasi kemajuan bangsa, dituntunlah oleh Puspindes Kabupaten Pemalang yang hadir dan membersamai sebagai motor penggerak teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Pemalang. Sejak 2016, Puspindes telah mendampingi desa-desa yang ada di Kabupaten Pemalang. Dalam perwujudannya, Puspindes telah melakukan hal pokok menuju kemajuan, dimulai dari pelatihan TIK dasar bagi perangkat desa, pelatihan model

perangkat telekomunikasi, pelatihan program ajar *website* desa, dan diikuti layanan pengembangan terhadap jaringan internet di desa (Khusna, 2019).

Puspindes juga menaungi 222 *website* desa beserta kelurahan di wilayah Kabupaten Pemalang yang kemudian terciptalah sinergi hubungan administrasi pemerintahan kabupaten dan pemerintah desa dengan jalinan keterbukaan akses informasi. Realitasnya, pengembangan *e-government* melalui *website* di desa-desa Kabupaten Pemalang tidak semudah yang dibayangkan. Pada kebanyakan desa di Pemalang, diketahui bahwa pengelolaan *website*-nya banyak mengalami stagnansi, yaitu tidak *up-to-date*, konten yang tersaji tidak maksimal, tampilan pilihan menu yang seadanya, dan isi *website* yang cenderung kurang informatif. Sebagaimana semestinya, penerapan *e-government* oleh instansi pemerintah tidak hanya sekadar mengikuti trend saja yang kemudian tidak terjadi keberkelanjutan.

Namun pada beberapa tingkat, terdapat pemahaman yang baik juga mengenai konsep *e-government* sebagaimana semestinya, terdapat Desa Bulakan yang di antaranya berhasil menjadi *website* desa terbaik mengenai

pemanfaatan *website* sebagai sistem informasi dan pelayanan publik. Desa Bulakan dengan wilayah topografinya berupa pegunungan, ini diikuti dengan anggapan rata-rata bahwa terdapatnya akses sinyal yang cukup sulit, justru memiliki *website* desa yang layak dan sangat baik beserta beberapa pelayanan publiknya yang sudah dapat dilakukan secara *online*.

Pada tahun 2020, Desa Bulakan menjadi desa pemenang Lomba *Website* Desa Kabupaten Pemalang 2020 yang diselenggarakan oleh Puspindes dan juga diikuti oleh total 211 desa di Kabupaten Pemalang. *Website* Desa Bulakan dibangun guna penyampaian informasi penting mengenai desa kepada masyarakat desa dan luar desa. Dalam mempromosikan potensi Desa Bulakan baik SDA maupun SDM, *website* desa juga hadir sebagai media yang tepat. Selain itu, masyarakat Bulakan juga dapat berinteraksi dengan desa melalui chat *online* yang tersedia di *WhatsApp* dan juga dengan mudah mendapatkan layanan publik lainnya. Situs web Desa Bulakan dapat diakses melalui laman <https://bulakan.desa.id>.

Dilihat dari bagaimana *e-government* berbasis situs web benar-benar dapat berpengaruh bagi

pembangunan, maka terciptalah setidaknya kemajuan tersebut bagi upaya desa dalam meningkatkan kehidupan sebagian besar masyarakatnya yang selama ini telah tertinggal dibandingkan mereka yang berada di negara-negara maju. Melalui digitalisasi tersebut, tujuan yang ingin dicapai ialah masyarakat desa yang berdaya.

Agar sebuah *website* desa tidak hanya dijadikan sebagai media informasi dan transparansi publik saja, maka Desa Bulakan hadir sebagai salah satu panutan dan percontohan situs web terbaik di Pemalang. Sedikitnya, perlu ada adopsi pedoman pengembangan situs web dalam menciptakan layanan publik *online* bagi desa lain melalui proyek *e-government* situs web tentang langkah-langkah seperti apa yang diambil Desa Bulakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memastikan akses yang tersedia itu sama untuk semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepuasan manfaat dalam proyek *e-government* dilihat melalui kacamata Elemen Sukses Pengembangan *E-Government* (*Support*, *Capacity*, dan *Value*).

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen sukses pengembangan *e-government* (*support, capacity, value*) pada situs web yang dilakukan oleh Desa Bulakan dan dinamika kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-government* melalui situs web tersebut.

KERANGKA TEORI

E-Government

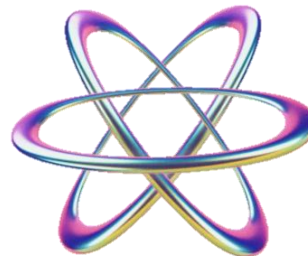
Secara umum *e-government* dapat dipahami sebagai pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (Napitupulu, et al., 2020). *E-government* disebutkan (Kraemer & King, 2003) mengacu pada penggunaan teknologi informasi (TI) untuk memajukan kompetensi, efektivitas, kejelasan, dan akuntabilitas pemerintah publik. Layanan *e-government* tersebut menurut (Rana, Williams, Dwivedi, & Williams, 2012) disediakan untuk warga negara, karyawan sektor swasta maupun publik, dan organisasi pada tingkat yang berbeda. West (2004) juga mendefinisikan bahwa *e-government* mengacu pada penyampaian informasi

pemerintah dan layanan *online* melalui internet atau lainnya dalam konteks sarana digital. Di sini, internet membebaskan warga untuk mencari informasi sesuai pada kenyamanan mereka sendiri, bukan hanya ketika pemerintah seperti sediakala ketika masih dalam pelayanan langsung di kantor terbuka. Aspek interaktif dari *e-government* memberikan fasilitas baik kepada warga negara maupun birokrat untuk mengirim dan menerima informasi (West, 2004).

Elemen Sukses dalam Pengembangan *E-Government*

Menurut hasil kajian Harvard JFK School of Government dalam menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh.

Gambar 1. *Nexus Elements of Success*



Masing-masing elemen sukses pengembangan *e-government* tersebut

adalah *support*, *capacity*, dan *value* (Indrajit, 2006):

1. **Support** (Dukungan), merupakan keinginan atau dukungan yang diyakini sangat krusial dalam usaha mencapai kesuksesan perjalanan *e-government*, dengan aspek-aspek: (a) *political will*, dukungan ini menunjukkan keseriusan pengembangan *e-government* yang diwujudkan dengan kebijakan atau peraturan yang mendukung terlaksananya *e-government* dan lembaga yang nantinya diembankan tugas dalam pengelolaan *e-government*; (b) pengalokasian sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi dan lain-lain). Ialah analisis kondisi sumber daya yang tersedia. Dimulai dari sumber keuangan, sumber daya manusia, sampai tataran pemerintahan dalam membangun konsep lintas sektoral; (c) infrastruktur pendukung, infrastruktur yang memadai ialah tanda bahwa keberhasilan *e-government* sudah 50%; (d) sosialisasi dan kontinuitas, pengembangan *e-government* perlu merata, berkelanjutan, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan agar kontinuitas *e-government* dalam memberikan layanan publik dapat cepat, efisien, efektif dan praktis tercapai.

2. **Capacity** (Kapasitas), ialah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah setempat guna mewujudkan impian *e-government* menjadi nyata, dengan aspek-aspek: (a) sumber daya finansial, merupakan ketersediaan sumber daya finansial pemerintah Desa Bulakan untuk mengalokasikan anggaran dalam pengembangan *e-government*; (b) infrastruktur, merupakan ketersediaan berbagai infrastruktur teknologi informasi pendukung yang dibutuhkan pemerintah Desa Bulakan dalam mengembangkan *e-government*; (c) Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar *e-government* dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. **Value** (Nilai Manfaat), merupakan nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Bulakan dengan adanya pengembangan *e-government* di Desa Bulakan, dengan aspek-aspek: (a) manfaat bagi Pemerintah Desa, dilihat dari aspek pelayanan, aspek pengarsipan data (administrasi), aspek komunikasi (hubungan) pemerintah desa dengan masyarakat, aspek transparansi

(demokratisasi); (b) manfaat bagi Masyarakat, dilihat dari aspek biaya pelayanan, aspek waktu pelayanan, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politis.

Perpaduan ketiga elemen terpenting tersebut akan membentuk sebuah pusat syaraf jaringan *e-government* yang disebut dengan *nexus*. Ini merupakan bentuk kunci sukses utama penjamin probabilitas atau keberhasilan *e-government*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk meneliti pada kondisi obyek bersifat alamiah, di mana posisi seorang peneliti ialah sebagai instrumen kuncinya (Sugiyono, 2017). *Case study* (studi kasus) diambil oleh peneliti sebagai metode ini adalah bagian tindakan kehidupan nyata manusia dalam aktivitas sosial di lingkungan alam tertentu.

Penetapan situs dilakukan di Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Subjek penelitian ini ialah Pemerintah Desa Bulakan yang mencakup pengelola *website* dan masyarakat Bulakan yang

mempunyai pengalaman terkait pengembangan *website* desa juga pelayanan *online*-nya yang disediakan oleh Pemdes Bulakan beserta stakeholder tertentu seiring berjalannya proses penelitian. Penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling*, sebab penelitian tidak melakukan generalisasi dan *snowball sampling*. Penelitian menggunakan sumber data yang diperoleh dari 2 (dua) macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan *in-depth interview*, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif pada saat di lapangan dilakukan melalui proses dari *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergisme antara pemerintah desa dengan masyarakat demi perubahan yang lebih baik dan bisa memajukan masyarakat Desa Bulakan pada dasarnya telah dikembangkan dalam visi Desa Bulakan. Pengembangan visi dari Pemerintah Desa Bulakan didasarkan pada keinginan untuk memperbaiki kualitas hubungan pemerintah dengan

masyarakatnya. Pemerintah Desa Bulakan memulainya dengan sejumlah inisiatif untuk mengabarkan terjadinya kegiatan yang ada di desa dengan mekanisme kerja yang transparan. Hal sederhana ini telah menjadi titik awal mula Pemerintah Desa Bulakan dalam pengembangan *e-government* melalui situs web.

Pengembangan *E-Government* melalui Situs Web di Desa Bulakan

Dalam pengembangan *e-government* melalui *website*, Pemerintahan Desa Bulakan menerapkan banyak sekali fitur dan akses informasi seputar desa, sebagai berikut: (a) **Layanan publik**, beirisikan portal untuk pembuatan surat online dengan cepat via *whatsapp*, berita dan artikel, aduan warga, mobil siaga, halo bupati, bantuan polisi, kependudukan *online*, dan cek PBB, pembayaran PBB; (b) **Kontak** seperti *whatsapp*, email, *instagram* (@desabulakan), *facebook* (Desa Bulakan), *X (Twitter @desabulakan)*, *YouTube* (Desa Bulakan), (c) **Berita**, seperti artikel, opini, info, dan agenda; (d) **Profile**, merupakan selayang pandang tentang desa yang berisi sejarah, visi misi, kelembagaan,

monografi, statistik, potensi, inovasi, dan prestasi desa; (e) **Inovasi**, merupakan aplikasi lain yang dikembangkan oleh Desa Bulakan yang masih merupakan bentuk perpanjangan layanan *e-government*, yaitu Anak Bunda sebagai aplikasi anak balita untuk data antropometri yang masih berbentuk *prototype* dan Abdi, aplikasi belajar jarak jauh daring intranet; (f) **Data Desa**, yang beirisikan data anggaran, lengkap dengan infografisnya; (g) **Produk Hukum**, sekumpulan informasi mengenai produk hukum dari Desa Bulakan, terdapat Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Desa Bulakan yang tercatat di *website*; (h) **PPID**, laman dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID berfungsi untuk mengelola dan menyampaikan dokumen yang dimiliki oleh badan publik; (i) **Galeri**, memamerkan berbagai potensi desa, galeri pada *website* juga memiliki manfaat jangkauan yang luas untuk media promosi keanekaragaman Desa Bulakan untuk menarik masyarakat luar daerah untuk berkunjung dan berwisata; (j) **Event**, menu informasi mengenai kegiatan, agenda, maupun festival tertentu yang ditujukan untuk merayakan atau memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan oleh Desa Bulakan; (k)

Produk Desa, berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan produk buatan warga Desa Bulakan, mulai dari kuliner, kerajinan hingga fashion. *Website* desa hadir sebagai media yang tepat sebagai platform untuk ajang promosi produk-produk lokal buatan Desa Bulakan sehingga dapat bersaing dengan produk-produk di pasaran melalui jaringan dari jangkauan *website* yang luas.

Elemen Sukses Pengembangan E-Government melalui Situs Web (Support, Capacity, Value) di Desa Bulakan

Menurut hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government, ketiga elemen sukses tersebut adalah: *Support*, *Capacity*, dan *Value* (Indrajit, 2006). Ketiganya perlu diperhatikan sungguh-sungguh dan dimiliki oleh Desa Bulakan untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik.

Support

Kesuksesan *e-government* melalui *website* Desa Bulakan setidaknya perlu sebuah dukungan dan tidak dapat terlepas dari dukungan. Dukungan ini berasal dari semua pihak yang berkontribusi langsung terhadap

pelaksanaan *e-government*, baik dukungan dari pemerintah desa itu sendiri, masyarakat Desa Bulakan, maupun pihak stakeholder atau swasta. Adapun dukungan dari *penerapan e-government* melalui *website* di Desa Bulakan, antara lain: **a) Political Will**, Pemerintah Desa menunjukkan *political will* kepada publik akan keseriusan penyelenggaraan *e-government* melalui *website* desa. Diwujudkannya Peraturan Desa Bulakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Desa Bulakan. Dukungan berupa regulasi dasar hukum Perdes yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa dan mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program, serta pembangunan desa yang dilakukan Pemerintah Desa Bulakan; **(b) Pengalokasian sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dll), SDM**: Desa Bulakan telah menyiapkan Admin IT yang mumpuni dan berkompentensi. **Finansial**: seluruh pembiayaan pengembangan *e-government* merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa yang telah dianggarkan melalui APBDes Sinergitas pemerintah dan masyarakat Desa Bulakan yang mau berubah; **(c) Infrastruktur Pendukung**, Kunci dari setengah keberhasilan

penerapan konsep *e-government* sendiri adalah tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang sangat memadai. Infrastruktur dalam hal ini ialah berupa *hardware, software, tools*, dan fasilitas pengembang *e-government* lainnya; **(d) Sosialisasi dan Kontinuitas**, Kepala Desa sebagai inisiator utama bertindak konsisten menyosialisasikan dan terus memacu terimplementasikannya konsep *e-government* melalui *website* tersebut sebagai kunci keberhasilan. Respon positif ditunjukkan masyarakat atas pengembangan *e-government* melalui *website*. Masyarakat selalu mendukung transformasi positif dari Pemerintah Desa Bulakan. Tidak ada resistansi maupun penolakan dari masyarakat. Kontinuitas berguna untuk meningkatkan awareness lebih banyak masyarakat Bulakan akan perlunya *e-government* melalui *website*. Namun, tidak ada proyek *e-government* yang selalu berjalan mulus, dijumpai sosialisasinya sudah kontinyu namun kurang menyeluruh.

Capacity

Apabila dukungan atau *support* yang ada pada pengembangan *e-government* melalui *website* Desa Bulakan tidak

dibarengi dengan kapasitas atau *capacity* sebagai kemampuan dan kekuatan, tentu tidak akan ada hasil *value* atau manfaat bagi masyarakat selaku pengguna dari sistem tersebut. Terdapat tiga hal minimum yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bulakan sehubungan dengan elemen kapasitas ini, yaitu: **(a) Sumber Daya Finansial**, pembiayaan pengembangan *e-government* melalui *website* telah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dan dianggarkan melalui APBDes. Setiap tahun pembiayaan penyelenggaraan *e-government* mengalami peningkatan, Tahun 2020 berada di angka Rp 51.100.000, tahun 2021 Rp 74.978.000, tahun 2022 Rp 82.954.000 dan tahun 2023 Rp 63.461.200. Angka tersebut merupakan hal yang baik sebab inisiatif *e-government* bukan merupakan sesuatu yang dianggap “*nice to have*”, ada keseriusan prioritas di sana; **(b) Infrastruktur**, Desa Bulakan memiliki sarana prasarana sangat baik, desa menyediakan laptop utama berspesifikasi tinggi yang dikhususkan untuk Admin IT, *smartphone*, kamera digital, *drone*, dan lainnya sebagai sarana prasarana penunjang *e-government*. Desa Bulakan memiliki Forum Data Desa untuk melaksanakan

konsolidasi, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati data yang telah dimutakhirkan sebelum ditetapkan sebagai data desa. Ketersediaan data-data pokok yang termuat dalam website selanjutnya dapat meningkatkan *connectivity*; (c) **Sumber Daya Manusia (SDM)**, Desa Bulakan memiliki satu Admin IT utama yang posisinya merupakan Operator SID, yaitu Staff Non Perangkat yang berkompeten. Dijuarainya Lomba *Website* Desa se-Kabupaten Pemalang sebagai juara pertama pada tahun 2020 oleh Pupindes (Pusat Pemberdayaan Informatika dan Desa) Kabupaten Pemalang sudah merupakan bukti bahwa sumber daya manusia Admin IT Desa Bulakan terbaik di kelasnya. Admin IT Desa Bulakan memiliki relawan yang membantu dalam menyukseskan *e-government*, mereka ialah PokdarTIK atau Kelompok Sadar TIK. Desa Bulakan memiliki kelembagaan pada sistem informasi desa. Kelembagaan SID Bulakan terdiri atas Pengelola SID dan Forum Data Desa.

Value

Pada dasarnya, sebuah sistem diciptakan ialah untuk memperoleh *value* atau nilai manfaat, inisiatif *e-government* melalui

website di Desa Bulakan tidak akan ada gunanya apabila tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi dari konsep *e-government*. Manfaat yang diharapkan dari penerapan konsep *e-government* melalui *website* di Desa Bulakan ini diperoleh baik bagi Pemerintah Desa Bulakan maupun bagi masyarakat Bulakan yang merasakan langsung manfaat dari penerapan konsep *e-government*: (a) **Manfaat bagi Pemerintah Desa**, dilihat dari **aspek pelayanan**, mempermudah pelayanan melalui *online*. Layanan *online* membantu memangkas waktu pekerjaan Pemdes menjadi lebih cepat. **Aspek pengarsipan data (administrasi)**, mempermudah pekerjaan menjadi lebih simple dan tidak lagi bersusah payah mencari data lama. **Aspek komunikasi (hubungan) pemerintah desa dengan masyarakat**, tidak ada lagi sekat yang membatasi, masif dibuatnya grup-grup WhatsApp agar transfer informasi menjadi lebih cepat. **Aspek transparansi (demokratisasi)**, penyampaian informasi kepada masyarakat dan jauh lebih terbuka. Keterbukaan informasi melalui *website* juga meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemdes Bulakan. *Website* memberikan hak kepada masyarakat

untuk mendapat akses informasi dan beragam cara menyuarakan suara ke pemerintah.

(b) Manfaat bagi Masyarakat,

Aspek biaya pelayanan, pelayanan online telah menawarkan sistem komunikasi yang begitu murah. Masyarakat hanya perlu menghubungi nomor pelayanan melalui *WhatsApp*.

Aspek waktu pelayanan, pelayanan online menawarkan sistem yang cepat, efisien, dan terbuka bagi siapa saja. Pelayanan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu juga disediakan oleh Pemdес Bulakan.

Aspek ekonomi, terkenalnya produk desa dalam jangkauan yang luas, disediakan platform untuk tempat promosi produk-produk lokal buatan Desa Bulakan, mulai dari kuliner hingga *fashion*. Wajah Desa Bulakan yang semakin terkenal kemudian memunculkan potensi Desa Wisata. Masyarakat terberdayakan dengan kian meluasnya hubungan kerjasama: memperkuat ekonomi.

Aspek sosial budaya, beragam dan lengkapnya konten promosi desa yang tersaji pada *website*, menjadikan aspek sosial budaya yang melekat tidak luntur semudah itu dengan perkembangan jaman.

Aspek politis, mewujudkan

transparansi, akuntabel, berkemajuan, dan mewujudkan desa yang demokratis.

Kendala Pengembangan E-Government melalui Situs Web di Desa Bulakan

Pengembangan *e-government* melalui situs web di Desa Bulakan tentu bukan perkara yang mudah dan sederhana, melainkan cukup menantang juga berlaku dikarenakan *e-government* ini berkaitan dengan berbagai permasalahan serta konsekuensi yang mungkin muncul. Oleh karena itu, dapat dimengerti meskipun elemen sukses pengembangan *e-government* melalui *website*, yaitu tiga elemen *support*, *capacity*, *value* telah terpenuhi di Desa Bulakan tidak dapat membuat menutup mata terhadap kendala yang muncul dalam pengembangannya. Sebaliknya, hal-hal tersebutlah yang perlu ditelaah agar Pemerintah Desa Bulakan mampu mengatasi kendala tersebut sehingga dapat membuat *e-government* melalui *website* Bulakan semakin terencana, terstruktur, dan dapat selalu menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Beberapa kendala yang dirasakan tidak hanya terjadi dari pemerintah saja, tetapi juga masyarakat

desa, antara lain: (a) **Kendala dirasakan Pemerintah Desa**, pertama, dari infrastruktur (fasilitas/peralatan), dimana terdapat perbedaan prioritas dalam alokasi dana untuk pemenuhan kebutuhan antara Pusat dan keadaan di desa. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kurangnya kemampuan Pemdes dalam mendistribusikan tenaga ahli tambahan pembantu full time untuk Admin IT Desa; dan (b) **Kendala dirasakan masyarakat**, pertama, dari infrastruktur (fasilitas/peralatan), yaitu kurangnya pemerataan jaringan internet karena alasan topografinya yang berbeda (*blank spot*) dan kedua, ada keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kualitas SDM ialah karena pendidikan yang masih rendah.

KESIMPULAN

Tantangan era digitalisasi pada pemerintahan berhasil terjawab oleh Desa Bulakan dengan diciptakannya situs web atau *website* desa Bulakan *bulakan.desa.id* sebagai pengembangan dari *e-government*. Desa Bulakan melaksanakan *e-government* melalui *website* merupakan bagian dari implementasi terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Desa pada Pasal 86 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dikembangkannya *e-government* melalui *website* adalah atas dasar inisiatif menginformasikan kegiatan yang ada di Desa Bulakan dan memberdayakan masyarakatnya untuk dapat memenuhi keingintahuan dan kebutuhannya secara mandiri. Bukan sekadar karena latak belaka, *website* desa oleh Pemdes Bulakan jelas terkonsep dalam pengembangan *e-government* melalui *website*. Tentu, suksesnya pengembangan *e-government* melalui *website* di Desa Bulakan telah dapat dibuktikan dari ketiga elemen sukses penerapan pengembangan *e-government* (*support, capacity, value*). Perpaduan ketiga elemen *support, capacity, value* tersebut akhirnya membentuk sebuah pusat syaraf jaringan *e-government* yang disebut dengan *nexus*. *Nexus* pun membentuk probabilitas proyek *e-government* melalui situs web Bulakan tersebut tinggi.

SARAN

Suksesnya pengembangan *e-government* melalui *website* di Desa Bulakan memerlukan kesiapan matang dari berbagai elemen.. Oleh karena itu, saran

yang dapat diberikan adalah: (a) Bagi Pemerintah Desa agar dapat menambah Tenaga IT yang sesuai dengan kompetensi dengan perekrutan dan mempertahankan sumber daya manusia Admin IT yang memiliki keahlian mengimplementasikan e-government serta sosialisasi menyeluruh untuk mencerdaskan masyarakat terkait pemahaman website; (b) Bagi masyarakat sebagai penerima manfaat diharapkan lebih mampu untuk mengakses *website* Desa Bulakan untuk mencari tahu informasi pelayanan publik atau yang lainnya. *Optimalnya e-government* juga tidak terlepas dari kemauan masyarakat untuk senantiasa berkembang; (c) Bagi peneliti di masa mendatang yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa diharapkan melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap bagaimana *e-government* dapat memperbaiki kinerja birokrasi dan lebih responsif terhadap permintaan masyarakatnya, yang mana perlu pula memperhatikan hal-hal semacam kepastian hukum, demokratisasi, dan pecegahan dari korupsi secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Khusna, I. H. (2019). Village Development Strategy by Utilization of ICT in Pematang. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 23(2), 76-89.
- Kraemer, K. L., & King, J. L. (2003). Information Technology and Administrative Reform: Will the Time After E-Government Be Different? . *Center for Research on Information Technology and Organizations*, 1-19.
- Muksin, A., & Avianto, B. N. (2021). Governance Innovation: One-Stop Integrated Service to Enhance Quality Service and Public Satisfaction. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 16(1), 40-60.
- Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. H., Saputra, S., Jamaludin, . . . Simarmata, J. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rana, N. P., Williams, M. D., Dwivedi, Y. K., & Williams, J. (2012). Theories and Theoretical Models for Examining the Adoption of E-Government Services. *e-Service Journal*, 8(2), 26-56.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. *Public Administration Review*, 64(1), 15-27.